

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN N0.35/POJK.04/2017 TENTANG  
KRITERIA SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh**

**Suci Saulia Afifah Z.A  
1621030066**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN N0.35/POJK.04/2017 TENTANG  
KRITERIA SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh**

**Suci Saulia Afifah Z.A  
1621030066**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Otoritas jasa keuangan dalam mengawasi sektor Saham Syariah membuat suatu peraturan terkait kriteria Saham Syariah yang terdapat dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas jasa keuangan terkait Saham berbasis syariah tidak terlepas dari Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengenai keuangan syariah melalui Dewan syariah nasional. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, Bagaimana kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah? Kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang data-data nya berupa kata-kata yang berasal dari sumber jurnal, catatan, dan dokumen atau penelitian yang mengutamakan pendeskripsian secara analisis. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini yaitu peraturan otoritas jasa keuangan dan dokumen lain, kemudian setelah data terkumpul dilakukan keabsahan data dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 adalah tidak melakukan kegiatan dan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan memperbolehkan penggunaan dana non halal pada rasio keuangan dengan syarat persentase rasio total utang bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga dibandingkan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Dalam hukum Islam tentang kriteria Saham Syariah mengenai kriteria usaha, tidak mengandung unsur haram *lidzatihi* dan sesuatu yang bersifat merugikan atau merusak (*mudarat*). Namun, dalam hal kriteria rasio keuangan, apabila bercampur antara dana halal dengan dana non halal maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat dana halal lebih dominan dibandingkan dana non halal. POJK dan Fatwa DSN-MUI mengenai kriteria Saham Syariah pada perusahaan yang masuk kedalam Daftar efek syariah, merupakan suatu jalan untuk mempermudah dalam bermuamalah di Pasar modal syariah salah satunya pada efek Saham Syariah untuk para investor muslim dalam berinvestasi sesuai syariah dan untuk meningkatkan perkembangan kapitalisasi Saham Syariah di Indonesia.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Saulia Afifah Z.A

NPM : 1621030066

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 POJK.NO.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2019  
Penulis,

**Suci Saulia Afifah Z.A.**  
**NPM. 1621030066**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kiri H. Endra Sutardana Sukacame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.35/POJK.04/2017 TENTANG KRITERIA SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH**

Nama : **SUCI SAUTIA AFIFAH Z.A**

NPM : **1621030066**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUT**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munagasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pemhimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 197411062000031002**

**Pemhimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suranin Suranin, Bandar Lampung 35131 Telp. 0721704260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.35/POJK.04/2017 TENTANG KRITERIA SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH"** disusun oleh **SUCI SAULIA AFIFAH Z.A.** NPM: 1621030066, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jumat, 14 Februari 2020

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H., M.E.

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

Penguji I : Dr. Ffa Rodiah Nur, M.H.

Penguji II : Khoiruddin, M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Khoiruddin, M.H.**  
NPM: 16210321993031002



## MOTTO

قَالَ النَّوَوِيُّ : الْخَلْطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ بِحَالٍ يَنْحَصِرُ يَحْرُمُ الشَّرَاءُ مِنْهُ بَلَّ  
يُجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقْتَرَنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ  
يَقْتَرَنَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ تَرْكُهُ وَرَعٌ مُحَبُّوبٌ وَكُلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ تَأَكَّدَ الْوَرَعُ<sup>1</sup>

An-Nawawi berkata, ”Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah SWT, setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan *wara*’.

---

<sup>1</sup>Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), h. 219.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih dan rahmat-Nya untuk memudahkan segala urusan dalam penyusunan skripsi ini, dengan ucap syukur skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta almarhum Bapak Zainal Arifin dan Ibu Murtiningsih yang selalu memberikan dukungan serta senantiasa mendoakanku demi kelancaran dan kemudahan dalam menjalani hidup dan menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi, untuk selalu semangat salam menimba ilmu dan meraih masa depan yang kuimpikan, berkat doa dan restu Bapak dan Ibu aku bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai jenjang untuk meraih mimpiku.
2. Kakak-kakak tercinta Zulkarnain, Agung Wibowo, Linda, Teguh, Novi, Irfany yang selalu memberikan dukungan dan kasihnya serta semangat untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Dosen pembimbing Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H dan Bapak Khoiruddin, M.S.I yang sudah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para sahabatku terkasih Muamalah kelas B 2016 yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu yang didapatkan dijenjang ini dapat menghantarkan saya meraih impian dan di Ridhai oleh Allah SWT. Āmīn.



## **RIWAYAT HIDUP**

Suci Saulia Afifah Z.A, dilahirkan di Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 4 Februari 1998, anak ketujuh dari pasangan almarhum Bapak Zainal Arifin dan Ibu Murtiningsih.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Ujung Gunung Ilir Menggala dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Menggala dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Menggala dan selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017 sampai dengan selesai.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di beberapa organisasi intra kampus, yaitu UKM Bapinda, UKMF Gemais dan UKMF MCC Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, Desember 2019

Yang membuat,

**Suci Saulia Afifah Z.A**  
**NPM. 1621030066**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/Pojk.04/2017 Tentang Kriteria Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah”*. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan ajaran Islam dan sunahnya hingga akhir zaman untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan untuk salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yaitu :

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
2. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.

3. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M.H., selaku ketua sidang munaqasyah, Dr. H. Jayusman, M. Ag., selaku penguji 1 sidang munaqasyah, Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I., selaku sekretaris sidang munaqasyah, yang telah bersedia untuk membantu dan meluangkan waktu untuk menguji pada sidang munaqasyah.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa kuliah.
6. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pengurus dan kader UKM Bapinda, UKMF Gemais, dan UKMF MCC yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
8. Sahabat seperjuangan Dinia Sebwinda dan Widona Nia Yuningsih, Zikrin Julian Lestari, yang telah bersedia memberikan semangat, dukungan dalam masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
9. Sahabat kecil Perahu Kertas Arwando, Edo, Feri, Herdi, Melisa, Pedi, Ridho, Sri, Usman, yang telah memberikan doa serta motivasi untuk terus berjuang baik menyelesaikan skripsi dan menggapai impian.



10. Teman-teman seperjuangan perkuliahan dalam meraih mimpi kelas B Muamalah 2016, yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk terus berjuang.

11. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan.

Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya. Āmīn.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Bandar Lampung, Desember 2019

**Suci Saulia Afifah Z.A**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikasi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
 <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	 <b>16</b>
A. Kajian Teori .....	16
1. Akad Muamalah dalam Saham Syariah .....	16
2. Kriteria Saham Syariah dalam Fatwa DSN-MUI .....	19
3. Halal dan Haram dalam Islam .....	42
B. Tinjauan Pustaka .....	64
 <b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN .....</b>	 <b>66</b>
A. Gambaran Umum Objek .....	67
1. Sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan .....	67
2. Kedudukan, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	70
B. Kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah .....	81
1. Gambaran umum POJK.No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah .....	81

2. Pengaturan mengenai efek dan kriteria efek dalam Daftar efek Syariah .....	84
3. Daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	89
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
A. Kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah .....	93
B. Analisis hukum Islam terhadap kriteria Saham Syariah pada Pasal 2POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah .....	97
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Rekomendasi .....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001

Lampiran 2 : Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003

Lampiran 3 : Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011

Lampiran 4 : POJK.No.35/POJK.04/2017

Lampiran 5 : Blanko Konsultasi

Lampiran 6 : Hasil Turnitin

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya terlebih dahulu akan dijelaskan istilah-istilah pada judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah”**, adapun istilah-istilah dalam judul tersebut dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya.

Hukum Islam dalam pengertian ini adalah hukum ekonomi syariah yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta.<sup>1</sup> Dari definisi ini, pembahasan fikih muamalah itu menyangkut akad tukar menukar (*mu'awadhah*), seperti jual beli, sewa-menyewa. Akad tolong menolong (*tabarru'*), seperti hibah, wakaf, wasiat. Akad bagi hasil (*syirkah*), seperti akad kerjasama (*mudharabah*). Akad kepercayaan (*tautsiqat*), seperti pegadaian (*rahn*), akad jaminan (*kafalah*), akad pengalihan (*hiwalah*).<sup>2</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah adalah peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) mengenai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal pada efek Saham Syariah.

---

<sup>1</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), h. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 4.

Saham Syariah adalah saham yang dikeluarkan oleh unit usaha (emiten) yang memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bursa Efek.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa saham syariah yang dikeluarkan oleh emiten memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bursa Efek melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Daftar efek syariah adalah kumpulan Saham Syariah yang ada pada daftar surat-surat berharga Saham Syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.<sup>4</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah menganalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah mengenai Pasal 2 POJK.N0.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam daftar efek syariah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adanya beberapa alasan untuk memilih penelitian yang berjudul analisis hukum Islam terhadap Pasal 2 POJK.N0.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah yaitu:

### **1. Alasan Obyektif**

Adanya peraturan mengenai seleksi kriteria Saham Syariah yang terdapat pada Pasal 2 POJK.N0.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah

---

<sup>3</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 759.

<sup>4</sup>Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2018), h.85.



dalam Daftar efek syariah yang mensyaratkan penggunaan dana non halal terhadap rasio total utang dan rasio total pendapatan perusahaan untuk masuk kedalam seleksi kriteria Saham Syariah, yang diseleksi pemenuhan prinsip Islamnya oleh OJK sehingga perlu dianalisis dari peraturan tersebut dengan sudut pandang hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah.

## 2. Alasan Subyektif

Adanya penelitian mengenai kriteria Saham Syariah dalam Pasal 2 POJK.N0.35/POJK.04/2017 sesuai dengan bidang keilmuan peneliti yaitu hukum ekonomi syariah mengenai usaha perusahaan dan keuangan perusahaan, serta tersedianya literatur yang menunjang untuk menganalisis, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

## C. Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, ada tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek Islam, aspek iman dan aspek ihsan. Jika dilihat dari tiga aspek yang mendasari ajaran Islam tersebut. Islam tidak hanya memerhatikan ibadah (*hablum minallah*), tetapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan.<sup>5</sup>

Perekonomian berbasis syariah di Indonesia sudah mengalami perkembangan dengan adanya industri keuangan Islam. Industri keuangan di

---

<sup>5</sup>Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern". *Al- 'Adalah*, Vol.XII No.3 (Juni 2015), h.647-648.

Indonesia dalam sektor jasa keuangan diawasi oleh OJK, kewenangan OJK dalam industri keuangan dapat membuat suatu peraturan untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan salah satunya dalam sektor Saham Syariah.

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria yaitu jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.<sup>6</sup>

OJK dalam mengawasi sektor Saham Syariah membuat suatu peraturan terkait kriteria Saham Syariah untuk mengatur dan mengawasi yang terdapat pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait saham berbasis syariah tidak terlepas dari Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengenai keuangan syariah melalui Dewan Syariah Nasional.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 mengenai pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bisnis yang dilarang oleh syariat bagi emiten syariah, yang juga disebut penyaringan bisnis (*core business screening*), yaitu perjudian, lembaga keuangan konvensional, perdagangan yang dilarang syariat, jual beli risiko, penyedia barang atau jasa yang haram dan bersifat mudarat.

---

<sup>6</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta : Erlangga), h. 602.

Fatwa ini menjadi acuan dasar dalam menentukan kriteria Saham Syariah oleh OJK dalam Pasal 2 POJK. No.35/POJK.04/2017 yang berbunyi “pertama, emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha atau memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, kedua, rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%, ketiga, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.”<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dalam penetapan kriteria Saham Syariah untuk perusahaan yang akan masuk ke Daftar efek syariah yaitu kumpulan efek syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar efek syariah, menjadi problematika akan kesyariahan dalam peraturan tersebut terhadap keterlibatan penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan yaitu rasio total utang pada bank konvensional dan pendapatan dana non halal dalam penentuan kriteria Saham Syariah. Dengan demikian, penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan yang menjadi penentuan dalam kriteria Saham Syariah yang masuk ke Daftar efek syariah ini merupakan pertimbangan, yaitu kenyataan bahwa emiten saat ini belum bisa terbebas secara total menggunakan jasa perbankan konvensional. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perbankan konvensional masih mendominasi sistem perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Sistem perbankan berbasis bunga telah mengakar dan membudaya pada seluruh lapisan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 89.

masyarakat, baik kalangan ekonomi bawah, menengah maupun atas.<sup>8</sup> Bagi seorang investor muslim, melakukan kegiatan pengelolaan investasi tidak boleh hanya berpedoman pada kinerja keuangan perusahaan, melainkan juga harus memperhatikan pada aspek kesyariahan perusahaan.<sup>9</sup>

Organisasi Konferensi Islam (OKI) termasuk diantara yang berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram sebagaimana dilansir dalam keputusannya no.7/1/65, pada pertemuan ke-7 sebagai berikut :

أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ غَرَضُهَا الْأَسَاسِيُّ مُحَرَّمٌ كَالْتَعَامُلِ  
بِالرِّبَا أَوْ إِنْتَاجِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ الْمُتَاجِرَةِ بِهَا وَالْأَصْلُ حُرْمَةُ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ تَتَعَاَمَلُ  
تَتَعَامَلُ أَحْيَانًا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ أَنْشِطَتَهَا الْأَسَاسِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ<sup>10</sup>

Artinya: “Bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram seperti transaksi ribawi dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu adalah usaha yang halal.”

Pendapat Organisasi Konferensi Islam (OKI), bahwa dana halal yang bercampur dengan dana non halal itu hukumnya haram. Adanya pro kontra dengan pendapat ulama mengenai memperbolehkannya penggunaan dana non halal, jika dana yang halal lebih dominan daripada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal, seperti pada kaidah *fiqh*:

<sup>8</sup>Yoyok Prasetyo, “Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah”. *Ekuibis*, Vol. 1 No. 2 (Februari 2017), h. 70.

<sup>9</sup>Muhammad Adlan, “Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No.2 (Juni-Des 2018), h. 104.

<sup>10</sup>Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), h. 217.

لَا أَكْثَرُ حُكْمِ الْكُلِّ<sup>11</sup>

Artinya: Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan

Permasalahan mengenai kesyariahan dalam peraturan pada Pasal 2 POJK. No.35/POJK.04/2017, selain melibatkan kaidah fikih dan pendapat para ulama mengenai pencampuran dana halal dengan dana non halal, juga melibatkan kegiatan usaha tentang hukum benda yang bercampur antara yang halal dengan yang haram, atau antara benda najis dengan benda suci, untuk mengetahui kesyariahan dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah.

Kaidah fikih yang digunakan sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ<sup>12</sup>

Artinya: Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka sesuatu hal pencampuran tersebut dihukumi haram.

Makna kaidah tersebut dalam hukum benda yang bercampur antara yang halal dengan yang haram, atau antara benda najis dengan benda suci yaitu apabila benda halal yang cair bercampur dengan benda haram yang cair, maka dianggap haram secara hukum, atau apabila benda najis yang cair bercampur dengan benda cair lainnya yang suci, maka dianggap najis secara hukum.<sup>13</sup>

Problematika mengenai kesyariahan pada pencampuran dalam penggunaan dana non halal pada emiten yang masuk dalam kriteria Saham Syariah menyebabkan problematika dari peraturan yang dikeluarkan OJK.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 218.

<sup>12</sup>Ma'aruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah Penopang Arus Baru Ekonomi Indonesia* (Banten : STIF Syentra, 2018), h. 91.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 97.

Mengingat bahwa ulama memperbolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk *mashalih 'ammah*, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.<sup>14</sup> Namun, penyaluran dana non halal dalam kerjasama antara emiten dan investor hanya berupa pembagian keuntungan sesuai nilai penanaman modal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dianalisa lebih lanjut terhadap adanya dana non halal pada pengelolaan perusahaan dalam hal rasio utang dan rasio pendapatan yang terdapat pada peraturan OJK mengenai kriteria Saham Syariah, dengan penelitian yang berjudul “analisis hukum Islam terhadap Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah.”

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah, dengan menganalisis peraturan tersebut berdasarkan hukum Islam dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah ?

---

<sup>14</sup>“Iniziatif Zakat Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://izi.or.id/peruntukan-dana-non-halal/> (4 Mei 2019).



2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah yang dianalisis berdasarkan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan pengetahuan mengenai kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah berdasarkan sudut pandang hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah.
  - b. Memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah mengenai Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah untuk mengetahui kesyariahannya, yang dianalisis berdasarkan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai penetapan kriteria Saham Syariah untuk emiten dalam perdagangan Saham Syariah dengan perkembangan kegiatan muamalah di era modern perspektif hukum Islam. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data-data nya berupa kata-kata bukan angka-angka yang berasal dari sumber data, catatan, laporan, dan dokumen atau penelitian yang mengutamakan pendeskripsian secara analisis.

### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

#### a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisis data tidak menggunakan model metamatik dan model statistik melainkan analisis data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara

---

<sup>15</sup>M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 21.

sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang “analisis hukum Islam terhadap Pasal 2 POJK.NO.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah.”

b. Prosedur Penelitian

Analisis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian.

Prosedur penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif mencakup 3 langkah-langkah penelitian yaitu:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sebatas tentang informasi yang diperolehnya.
2. Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
3. Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.43.

## 2. Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat informasi yang valid dari teks.<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu analisis isi kualitatif. Analisis isi dalam penelitian ini yaitu pada isi Pasal 2 POJK.NO.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah yang dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah.

## 3. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kepustakaan ini dari sumber data primer, dan sumber data sekunder yaitu:

### a. Sumber data primer

Berasal dari bahan hukum primer pada POJK.N0.35/POJK.04/2017

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>18</sup> Data dari sumber yang telah ada mengenai penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian mengenai kriteria Saham Syariah.

Metode pengumpulan data merupakan suatu pendukung untuk memengaruhi kualitas data hasil penelitian karena tujuan utama dari

---

<sup>17</sup>Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)". *Jurnal Ahmad*, Vol.1 No.1 (Juni 2018), h.1.

<sup>18</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka akan memengaruhi kualitas data dari hasil penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menelaah terkait POJK.N0.35/POJK.04/2017 perspektif hukum Islam dengan mencari beberapa pemikiran dari Majelis Ulama Indonesia mengenai kriteria Saham Syariah yang kemudian dijadikan bahan primer. Dan mempelajari dengan membaca literatur yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.

#### 4. Prosedur Analisis Data

Metode analisis data dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, dan model statistik melainkan analisis data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu penelitian yang berangkat dari praktik prinsip-prinsip syariah yang khusus digeneralisasi untuk ditarik secara umum berdasarkan hukum Islam. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui penggunaan dana non halal dalam POJK.N0.35/POJK.04/2017 tentang kriteria Saham Syariah dalam Daftar efek syariah, berdasarkan hukum Islam melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## 5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan suatu penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu, *credibility*, dan *dependability*.<sup>19</sup> Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

### a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketetapan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.<sup>20</sup>

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian untuk membuktikan kebenarannya menggunakan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah.

### b. Uji Dependibilitas (*Dependability*)

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.<sup>21</sup> Pengujian *dependability* pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan audit terhadap data penelitian yang didapat pada proses penelitian data untuk menguji keabsahan data hasil penelitian dengan berbagai sumber data penelitian yang didapat untuk mencapai kesesuaian antara data dan hasil penelitian, proses keabsahan

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 270.

<sup>20</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian gabungan)*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 394.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 398.



uji dependibilitas pada penelitian ini dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen yakni pembimbing skripsi.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad Muamalah dalam Saham Syariah

Akad dalam transaksi ialah kesepakatan atau perjanjian yang mengikat para pihak mengenai transaksi yang akan dilakukan, baik tentang objek maupun metode transaksinya. Dengan tidak adanya akad, maka transaksi dianggap tidak sah. Terdapat dua penggunaan akad di pasar modal syariah yaitu penerbitan efek dan transaksi jual beli efek.<sup>1</sup> Akad transaksi Saham Syariah pada pasar modal syariah yaitu:

##### a. Akad jual beli

Jual beli ialah suatu transaksi yang melibatkan pihak pembeli (*al-musyitari*) atau yang mewakili dan pihak penjual (*al-bai'*) atau yang mewakili dan barang atau objek jual beli (*mustman*).<sup>2</sup> Pandangan fikih mengenai kepemilikan barang terdiri atas kepemilikan secara fisik (*qabd hakiki*) dan kepemilikan secara hukum (*qabd hukmi*). Transaksi jual beli di sektor keuangan syariah lebih banyak berbentuk *qabd hukmi* karenapada dasarnya produk keuangan syariah ialah produk yang kepemilikannya non fisik, tetapi diakui secara hukum. Beberapa di antaranya yang paling banyak terjadi atau digunakan dalam keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2018), h. 44.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 47.

1. *Bai' al-musawamah*

Akad jual beli yang digunakan saat transaksi Saham Syariah di pasar modal syariah ialah akad *bai' al-musawamah* yaitu jual beli dengan harga tawar menawar, harga barang yang ditawarkan penjual adalah harga jual bukan harga perolehan barang.

2. *Bai' al-murabahah*

Akad jual beli suatu barang dengan penjual yang menegaskan atau memberi tahu harga beli barangnya dan pembeli membayarnya dengan harga yang telah disepakati.

3. *Bai' al-salam*

Akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal akad secara tunai sedangkan pengiriman barangnya secara tangguh dengan periode waktu pengiriman yang disepakati bersama para pihak. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar akad penerbitan efek derivatif syariah.

4. *Bai' al-istisna*

Akad jual beli yang pengiriman barangnya secara tangguh dengan pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak, biasanya bertahap sesuai tahapan penyelesaian pembuatan barang atau objek transaksi.<sup>3</sup>

b. Akad kerjasama

Akad kerjasama ialah akad perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha yang bersifat mengikat para pihak dan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 50-53.

mempunyai tujuan yang harus dicapai bersama. Beberapa akad kerjasama yang digunakan transaksi Saham Syariah yaitu:

1. Akad *musyarakah*

Akad *musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan para pihak (*syarik*) memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*). Ketentuan nisbah dalam akad *musyarakah* bisa berbeda antara nisbah keuntungan dengan nisbah kerugian usaha yang ditentukan sesuai dengan komposisi modal yang disetorkan atau hanya menggunakan nisbah proporsional.

2. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* ialah akad kerjasama untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal usaha dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*).<sup>4</sup>

c. Akad pemberian kuasa (*wakalah*)

*Wakalah* ialah transaksi antara penjual dan pembeli yang tidak secara langsung dilakukan diantara mereka, tetapi dapat diwakilkan. Transaksi di Bursa Efek Indonesia pembeli Saham Syariah tidak pernah bertemu dengan penjualnya. Investor jual dan beli harus memberi kuasa atau mewakilkan transaksinya kepada pihak lain, yaitu perusahaan efek sebagai wakil mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 55-62.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 64.

## 2. Kriteria Saham Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI terkait pemilihan dan pelaksanaan investasi, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman pelaksanaan investasi Saham Syariah.<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI ini berlandaskan hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.  
(Q.S. An-Nisa 4:29)

Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 memuat hal-hal berikut:

### a. Bab IV pemilihan dan pelaksanaan investasi, meliputi:

#### 1. Pasal 7 mengenai jenis dan instrumen investasi:

- a) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam.
- b) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi, instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah;

#### 2. Pasal 8 mengenai jenis usaha emiten:

---

<sup>6</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 567.

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.
  - b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain, adalah, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk Perbankan dan Asuransi konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
3. Pasal 9 mengenai jenis transaksi yang dilarang:
- a. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*ihthiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).
  - b. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
    - 1) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
    - 2) *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
    - 3) *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;



- 4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utangnya lebih dominan dari modalnya.
4. Pasal 10 mengenai kondisi emiten yang tidak layak, suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:
- a) Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
  - b) Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
  - c) Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.<sup>7</sup>
- b. Bab V penentuan dan pembagian hasil investasi, Pasal 11 yaitu:
1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
  2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
  3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syariah adalah:
    - a. Dari saham dapat berupa sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 575.

1. *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
  2. *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
  3. *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
- b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa, bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
  - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa, bagi hasil yang diterima dari penerbit (*issuer*).
  - d. Dari Deposito dapat berupa, bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
  5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah merupakan fatwa yang pertama untuk mengatur kegiatan investasi di pasar modal syariah sehingga berkaitan dengan investasi di efek Saham Syariah sebagai pedoman berinvestasi untuk investor muslim.

Fatwa DSN-MUI terkait prinsip-prinsip syariah didalam Saham Syariah, termaktub dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI berlandaskan hukum, pertama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.  
(Q.S. An-Nisa 4:29)

Kedua, Hadis Nabi SAW, yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>10</sup>

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar.  
(H.R. Al-Bayhaqi dari Ibnu Umar)

Ketiga, kaidah fiqh

أَلَّا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>11</sup>

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 600.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 594.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 596.

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 memuat hal-hal berikut:

a. Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 dalam fatwa ini yaitu:

1. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran Umum.
3. Efek syariah, efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
4. *Sharia Compliance Officer (SCO)* adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di Pasar modal.
5. Pernyataan kesesuaian syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 600.

b. Bab II prinsip-prinsip syariah di bidang Pasar modal, Pasal 2 mengenai Pasar modal yang menjelaskan:

1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI.<sup>13</sup>

c. Bab III emiten yang menerbitkan efek syariah, Pasal 3 mengenai kriteria emiten atau perusahaan publik yang menerangkan:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
  - a. Kegiatan usaha yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk Perbankan dan Asuransi konvensional;
  - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
  - d. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat merugikan atau merusak (*mudarat*).

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 601.

- e. Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.<sup>14</sup>
- d. Bab IV kriteria dan jenis efek syariah, Pasal 4 mengenai jenis efek syariah yang menjelaskan:
  1. Efek syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.<sup>15</sup>
- e. Bab V transaksi efek, Pasal 5 transaksi yang dilarang yaitu:
  1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur kerugian (*dharar*), ketidakjelasan (*gharar*), penambahan uang (*riba*), perjudian (*maisir*), suap menyuap (*risywah*), maksiat dan kezhaliman.
  2. Tindakan yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas meliputi:
    - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 602.



- b. *Bay'u al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);
  - c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
  - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
  - e. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut; dan
  - f. Penimbunan (*Ihtikar*), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
  - g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.<sup>16</sup>
- f. Bab VI harga pasar wajar, Pasal 6 tentang harga pasar wajar yang menjelaskan:
- Harga pasar dari efek syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direayasa.<sup>17</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Pasal 4 ayat 2 yang menerangkan bahwa, Saham Syariah

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 603.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 604.

adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Pasar Modal Syariah di Indonesia penyertaan modal serta prinsip-prinsip syariah, tidak diwujudkan dalam produk Saham Syariah maupun non syariah, melainkan diwujudkan melalui indeks Saham yang berasaskan prinsip-prinsip syariah.<sup>18</sup> Pada saat ini Bursa Efek dan Pasar Modal Islam Indonesia memiliki tiga indeks Saham Syariah<sup>19</sup> yaitu pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)<sup>20</sup> diluncurkan pada tahun 2011, kedua, Jakarta Islamic Indeks (JII)<sup>21</sup> diluncurkan pada tahun 2000, ketiga, Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 70)<sup>22</sup> diluncurkan pada tahun 2018.<sup>23</sup>

Kategori saham yang masuk ke dalam indeks saham yang berasaskan prinsip-prinsip syariah yakni ISSI, JII, JII 70, tentunya melalui proses *screening* yaitu penyaringan usaha (*core business screening*) dan penyaringan rasio keuangan (*financial ratio screening*). Kedua proses *screening* ini diatur oleh Fatwa DSN-MUI yaitu *core business screening* atau penyaringan usaha diatur dalam Fatwa sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Muhammad Yafiz, “Saham dan Pasar Modal Syariah (Konsep, sejarah, dan perkembangannya)”, *Miqot*, Vol. xxx No. 2 (Juli – Desember 2008), h.239.

<sup>19</sup>Indeks saham syariah adalah variable yang menunjukkan kinerja Saham Syariah atau pasar saham syariah.

<sup>20</sup>ISSI adalah indeks komposit yang terdiri atas seluruh Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

<sup>21</sup>JII adalah indeks yang terdiri atas 30 Saham Syariah yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia.

<sup>22</sup>JII 70 adalah indeks yang terdiri atas 70 Saham Syariah yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia.

<sup>23</sup>Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2018), h. 92.

1. Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 8 mengenai jenis usaha emiten yang menjelaskan:

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain, adalah:
  - 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk Perbankan dan Asuransi Konvensional;
  - 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
  - 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.<sup>24</sup>

2. Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Pasal 3 ayat 2 mengenai kriteria emiten atau perusahaan publik.<sup>25</sup>

Berdasarkan kedua fatwa tersebut mengenai penyaringan kegiatan usaha (*core business screening*) yang termasuk kedalam prinsip-prinsip

---

<sup>24</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 574.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 572.

syariah yaitu pertama, jenis usaha atau produk barang terhindar dari perjudian atau perdagangan yang dilarang oleh *syara'*, kedua, usaha Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk Perbankan konvensional atau Asuransi konvensional, ketiga, usaha produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, dan keempat, usaha produsen, distributor, yang menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.<sup>26</sup>

Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 10 yang mengatur terkait penyaringan rasio keuangan (*financial ratio screening*), yang memuat bahwa suatu kondisi emiten yang tidak layak diinvestasikan apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%) dan apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.<sup>27</sup>

*Screening* atau metode penyaringan, yaitu proses penyeleksian Saham yang digunakan untuk menyeleksi Saham yang mencakup seleksi kriteria kualitatif dan seleksi kriteria kuantitatif. Adapun kriteria kualitatif yaitu mencakup jenis usaha emiten dan produk yang dihasilkan emiten, dan kriteria kuantitatif yaitu mencakup rasio keuangan seperti rasio utang dan

---

<sup>26</sup>Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syariah (Konsep, sejarah, dan perkembangannya)", *Miqot*, Vol. xxx No. 2 (Juli – Desember 2008), h. 240.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.241.

pendapatan non halal.<sup>28</sup> Dengan demikian, proses *screening* Saham untuk dikategorikan kedalam Saham Syariah melalui 2 tahap *screening* yaitu tahap pertama, *core business screening* dan tahap kedua, *financial ratio screening* yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003, sebagai kriteria Saham Syariah yang masuk kedalam Indeks saham yang berasaskan prinsip-prinsip syariah.

Emiten atau perusahaan yang telah memenuhi kriteria Saham Syariah dan akan menerbitkan efek syariah wajib menyetujui dan menandatangani ketentuan akad, serta menjamin kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer* (SCO) yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI untuk dimasukkan kedalam Daftar efek syariah.<sup>29</sup> Sebab saham yang telah masuk kategori Saham Syariah di Indonesia masuk kedalam Daftar efek syariah yaitu tempat kumpulan indeks-indeks yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya, pertama, aspek kegiatan usaha yang bersifat perjudian (*maisir*) tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam karena mengandung unsur spekulasi, seperti yang terkandung dalam nash:

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩

---

<sup>28</sup>Egi Ervian Firmansyah, “Seleksi Saham Syariah (Perbandingan antara BEI dan Malaysia)”, *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 1 (2017), h.6.

<sup>29</sup>Anna Nurlita, “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam”. *Kutub khanah*, Vol. 17 No.1 (Januari-Juni 2014), h. 8.

Artinya: Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.  
(Q.S. Al-Baqarah 2:9)

Berdasarkan pelarangan kegiatan usaha yang mengandung *maisir* tersebut, apabila emiten yang melakukan *maisir* dalam usahanya, maka tidak memperoleh pengesahan dari Dewan Pengawasan Syariah untuk masuk kedalam kriteria Saham syariah. Kedua, aspek transaksi bisnis keuangan yang menggunakan konsep ribawi seperti yang tertuang dalam nash:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  
(Q.S. Al-Baqarah 2:275)

Ketiga, produk yang haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*, yang dikatakan haram *lidzatihi* yaitu produk itu haram karena dari essensi barang tersebut, dan haram *lighairihi* yaitu produk itu haram bukan dari essensi barang tersebut melainkan dari luar essensi materi barang tersebut.<sup>30</sup>

Fatwa DSN-MUI terkait penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek, termaktub dalam fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 pertama, berlandaskan dasar hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُكُ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

<sup>30</sup>Agus Triyanta, "Gharar Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index". *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 4 (Oktober 2010), h.626.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalā-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.  
(Q.S. Al-Maidah 5:2)

Kedua, Hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhariy

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَىٰ عَنِ النَّجْشِ<sup>31</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW melarang (untuk) melakukan penawaran palsu (*najsy*).  
(H.R. Imam Bukhariy)

Ketiga, kaidah fiqh

أَلَّا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>32</sup>

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 memuat hal-hal berikut:

a. Bab 1 Ketentuan umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 709.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 712.

1. Perdagangan Efek bersifat ekuitas disingkat perdagangan efek di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
2. Efek bersifat ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.I tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik;
3. Efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah adalah efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI;
4. Pasar reguler adalah pasar dimana perdagangan efek di Bursa efek dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar (*bai' al-musawamah*) oleh anggota Bursa efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di Bursa efek;
5. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dana atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka;
6. Anggota Bursa Efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan



(Bapepam dan LK) sebagai perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dana atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di Bursa efek sesuai dengan peraturan Bursa efek;

7. Harga pasar wajar adalah haraga pasar dari efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak rekayasa;
8. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dana atau manajer investasi.<sup>33</sup>

#### b. Ketentuan Hukum

Mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus.

#### c. Ketentuan Khusus

##### 1. Perdagangan Efek

- a. Perdagangan efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*);
- b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 718.

- c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip secara hukum syara (*qabd hukmi*);
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah;
- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*);
- f. Dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

## 2. Mekanisme Perdagangan Efek

- a. Bursa efek boleh menetapkan aturan bahwa:
  - 1. Perdagangan efek hanya boleh dilakukan oleh anggota bursa efek;
  - 2. Penjual dan Pembeli efek yang bukan anggota bursa efek dalam melaksanakan perdagangan efek harus melalui anggota bursa efek;
- b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan anggota bursa efek dengan anggota bursa menggunakan akad upah (*ju'alah*);
- c. Bursa efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya transaksi yang mengandung kerugian (*dharar*) dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam perdagangan efek yang berdasarkan prinsip syariah di bursa efek;

- d. Bursa efek menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Bursa efek dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) perdagangan efek berdasarkan prinsip sewa menyewa (*ijarah*) atas penyediaan sistem dan atau sarana perdagangan kepada anggota bursa efek.<sup>34</sup>

### 3. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur kerugian (*dharar*), ketidakjelasan (*gharar*), penambahan uang (*riba*), perjudian (*maisir*), suap menyuap (*risywah*), maksiat dan kedzaliman, tipuan (*taghrir*), kecurangan (*ghisysy*), perdagangan semu (*tanajusy/najsy*), penimbunan (*ihthikar*), jual beli yang tidak ada barang (*bai' al-ma'dum*), rekayasa perdagangan dengan harga murah (*talaqqi al-rukban*), manipulasi perdagangan (*ghabn*) dan transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*tadlis*).<sup>35</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dipasar reguler bursa efek, memuat isi-isi sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 723-725.

<sup>35</sup>*Ibid.*

1. Transaksi perdagangan Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad *Bay' Al-Musawamah* yaitu akad jual beli dengan tawar-menawar dengan harga pasar yang wajar. Saham Syariah yang dapat di transaksikan terdapat dalam Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh OJK.
2. Kepemilikan Saham Syariah yang dimiliki investor adalah konsep kepemilikan secara *qabdh hukmi* yaitu investor yang sudah membeli Saham Syariah.
3. Sistem perdagangan dalam penyelenggara transaksi oleh Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)<sup>36</sup> dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)<sup>37</sup> yang dimiliki dan dikembangkan Self Regulatory Organization (SRO)<sup>38</sup> melalui Syariah Online Trading System (SOTS)<sup>39</sup> sebagai sistem transaksi Saham Syariah yang digunakan investor, dan pihak penyelenggara berhak meminta ujarah terhadap penggunaan sistem perdagangan yang diambil dari jumlah transaksi Saham Syariah yang dilakukan investor berdasarkan akad sewa menyewa dengan pemberian upah (*Ijarah bil ujarah*).<sup>40</sup>
4. Para investor harus menghindari transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011

---

<sup>36</sup>KPEI adalah lembaga penjaminan transaksi penyelesaian transaksi Bursa Efek Indonesia.

<sup>37</sup>KSEI adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral.

<sup>38</sup>SRO adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan atas suatu industri atau profesi.

<sup>39</sup>SOTS adalah sistem transaksi Saham Syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

<sup>40</sup>Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2018), h. 74.

terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semua transaksi yang dikategorikan haram adalah *riba*, *gharar*, *tadlis*, *taghrir*, *dharar*, yang dapat menimbulkan transaksi yang tidak wajar di Pasar modal.

5. Investor harus memiliki rekening efek syariah di perusahaan efek pada sistem SOTS supaya tidak terlibat dalam transaksi-transaksi yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan efek syariah.<sup>41</sup>

Berdasarkan Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 mengenai mekanisme perdagangan efek Saham Syariah, Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan sistem transaksi produk syariah yaitu SOTS. Suatu sistem untuk mengawasi dan mengontrol para investor yang akan melakukan transaksi Saham Syariah, sistem ini berisikan indeks-indeks yang memenuhi kriteria Saham Syariah seperti JII, ISSI, JII70, dan kriteria prinsip syariah yang dimaksud ialah transaksi yang tidak mengandung *riba* karena sesuai dengan saldo kas investor, transaksi tidak *gharar* karena harus tunai, portofolio yang terpisah, *margin trading*<sup>42</sup> dan *short selling*<sup>43</sup> dilarang, tidak bertransaksi pada Saham non syariah tetapi bertransaksi pada Saham yang telah masuk ke indeks-indeks syariah yang terdapat dalam Daftar efek syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 mengenai mekanisme

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Margin trading adalah langkah membeli saham dengan meminjam sejumlah uang dari perusahaan sekuritas.

<sup>43</sup>Short selling adalah suatu cara penjualan saham yang dilakukan investor untuk meminjam dana ketika menjual saham dengan harga tinggi dan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun.

perdagangan efek. Jika, dalam transaksi order investor Saham Syariah tidak sesuai dengan aturan SOTS, maka otomatis sistem SOTS akan menolaknya.

Dengan demikian, dapat dipahami mengenai prinsip dasar transaksi syariah mengenai investasi keuangan:

1. Tidak boleh melakukan transaksi yang dzalim, transaksi yang diperbolehkan yaitu transaksi yang memberikan nilai dan manfaat sehingga dapat dilakukan bagi hasil.
2. Uang tidak boleh dijadikan komoditas melainkan uang sebagai alat pertukaran yang berfungsi sebagai nilai untuk jual beli suatu barang yang dapat mendatangkan suatu kemanfaatan.
3. Tidak melakukan transaksi yang dapat menimbulkan kerugian atau unsur penipuan (*gharar*) sehingga transaksi harus dilakukan dengan transparan.
4. Mampu mengelola risiko yang timbul, agar tidak berdampak risiko yang besar, karena dalam transaksi Islam yakni jika mengharapkan hasil yang besar harus berani menanggung risiko yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan.
5. Adanya manajemen Islami yaitu nilai-nilai Islami yang tidak mengandung unsur-unsur spekulatif, riba yang dapat merugikan dan tidak melanggar hak-hak asasi yang dimiliki setiap orang.<sup>44</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan terlarangnya transaksi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Andri Soemitra, *Masa depan Pasar Modal syariah di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia, 2014), h. 253.

- a. *Haram lidzatihi*, mentransaksikan zat yang dilarang atau haram oleh syara. Misalnya, babi, *khamr*, daging bangkai. Maka, transaksi tersebut menjadi haram dan tidak diperbolehkan oleh syara.
- b. *Haram lighairihi*, mentransaksikan selain zatnya dengan melanggar prinsip syara. Misalnya, *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bai' najasy*, *riba*, *maisir*, *risywah*.
- c. Tidak lengkap akadnya, transaksi dapat batal karena tidak terpenuhinya syara dan akad, adanya ketergantungan akad dengan akad lainnya (*ta'alluq*), dan adanya penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*) dalam transaksi.<sup>45</sup>

#### 6. Memiliki kapasitas dalam berinvestasi

Nilai ajaran dalam Islam untuk berinvestasi dapat mempersiapkan generasi yang memenuhi aspek keimanan, intelektualitas, dan fisik terbentuklah insan dengan kepribadian yang utuh dalam kapasitas:

- a. Memiliki akidah yang benar
- b. Ibadah dengan cara yang benar
- c. Memiliki akhlak yang mulia
- d. Intelektualitas yang memadai
- e. Mampu untuk bekerja atau mandiri
- f. Disiplin atas waktu
- g. Bermanfaat bagi orang lain.<sup>46</sup>

### 3. Halal dan Haram dalam Islam

---

<sup>45</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fqih dan Keuangan)* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.

<sup>46</sup>Nurul Huda, Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (Jakarta : Prenadamedia, 2010), h.188.

### a. Dasar Ajaran Islam Mengenai Halal dan Haram dalam Bermuamalah

Ajaran Islam mengatur aktivitas muamalah di kalangan umat muslim diantaranya terdapat pada kaidah fikih yang khusus mengenai muamalah yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>47</sup>

Artinya : Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh (mubah) dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Ibnu Taimiyah memiliki pernyataan lain yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ<sup>48</sup>

Artinya : Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang di haramkan kecuali apa yang di haramkan Allah SWT.

Berdasarkan kaidah diatas memiliki arti bahwasanya, setiap aktivitas muamalah dan transaksi hukum asalnya mubah atau diperbolehkan, misalnya aktivitas jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan perwakilan, selama dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai aktivitas muamalah. Kecuali tidak diperbolehkan karena menjalankan aktivitas muamalah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami, seperti riba, perjudian, tipuan, dan kemudharatan.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ<sup>49</sup>

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Ibnu Taimiyah menerangkan lebih singkat yaitu:

---

<sup>47</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)* (Jakarta : Kencana, 2017), h. 130.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*



الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ<sup>50</sup>

Artinya: Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

Berdasarkan kaidah diatas memiliki arti bahwasanya, transaksi dilakukan atas dasar keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad maka transaksi dikatakan sah. Namun, jika diantara kedua belah pihak merasa dirugikan setelah akad dan menjadi hilang keridhaannya, maka akad transaksi tersebut bisa batal karena salah satu pihak merasa tertipu.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ<sup>51</sup>

Artinya: Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin pemilik harta.

Berdasarkan kaidah diatas, barang yang hendak diperjual belikan haruslah barang pemilik yang akan menjual barang tersebut atau seseorang yang diberi wasiat atau wakilnya.

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ<sup>52</sup>

Artinya: Akad yang batal tidak menjadi sah karena diboolehkan.

Berdasarkan kaidah diatas, atas dasar hukum Islam akad yang batal dianggap tidak ada, meskipun diterima oleh salah satu pihak. Karena adanya perbedaan prinsip-prinsip syariah dengan prinsip-prinsip non syariah. Jadi, meskipun pihak lain memperbolehkan adanya akad diperbedaan prinsip, tetapi Dewan Syariah Nasional tidak memperbolehkan perbedaaan prinsip untuk melakukan transaksi akad syariah dengan akad non syariah.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 131.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.*

### الإِجَارَةُ اللاحِقَةُ كَالوَكَالَةِ السَّابِقَةِ<sup>53</sup>

Artinya: Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu.

Berdasarkan kaidah diatas, seseorang yang menjadi perwakilan harta atas dasar izin dari pemilik harta, maka seseorang tersebut dapat bertindak hukum atas limpahan perwakilan yang diberikan pemilik harta. Jadi, tindakan hukum seseorang yang mewakilkan harta dari pemilik harta tersebut menjadi sah.

### الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ<sup>54</sup>

Artinya: Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.

Berdasarkan kaidah diatas, kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh salah satu pihak maka, hanya melakukan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan atas barang tersebut. Dengan cara mengganti barang yang sama atau membayar senilai barang tersebut.

### الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ<sup>55</sup>

Artinya: Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian.

Berdasarkan kaidah diatas, manfaat dari kepemilikan atas sesuatu yang didapatkan baik dari benda maupun pekerjaan, dapat dijadikan ganti rugi atas kerusakan atau cacat dari benda maupun pekerjaan yang didapatkan dari aktivitas muamalah.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 132.

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.* h. 133.

الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ<sup>56</sup>

Artinya: Risiko itu menyertai manfaat.

Berdasarkan kaidah diatas, sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk seseorang, maka harus siap menanggung risiko dari manfaat tersebut.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ<sup>57</sup>

Artinya: Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.

Berdasarkan kaidah diatas, akad dapat dibatalkan, jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan juga terlepas dari tanggungan yang di akadkan.

الْعَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا<sup>58</sup>

Artinya: Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.

Berdasarkan kaidah diatas, objek yang dijadikan akad dapat berupa barang melalui jual beli, dapat berupa manfaat seperti sewa menyewa, dan dapat berupa jasa. Objek yang dijadikan akad memiliki pengaruh hukum yang sama yaitu rukun dan syaratnya.

## **b. Dasar Ajaran Islam Mengenai Halal dan Haram**

Ajaran Islam sudah menentukan suatu batas wewenang dalam permasalahan halal dan haram adalah dengan cara melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, karena meskipun manusia memiliki kedudukan yang

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 134.

<sup>58</sup>*Ibid.*

tinggi dalam bidang agama maupun duniawinya. Jadi, hak untuk menentukan halal dan haram ialah semata-mata hak Allah SWT.<sup>59</sup> Sedangkan segala sesuatu yang tidak ada hukumnya mengenai halal dan haram ialah kembali kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk sesuatu yang di *ma'fukan* Allah SWT. Diriwayatkan dalam hadist Rasulullah SAW mengenai halal dan haram yaitu:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَائِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ<sup>60</sup>

Artinya: Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju, dan keledai hutan, maka jawab beliau : Apa yang disebut halal ialah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan yang disebut haram ialah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, sedang apa yang Ia diamkan, maka dia itu salah satu yang Allah SWT maafkan buat kamu. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَذَبُوا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ ۱۱۹

Artinya : Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Q. S. Al – An'am 6:119)

<sup>59</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya : Bina Ilmu, 2003), h. 19.

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 15.

Berdasarkan nash tersebut, bahwasanya dalam bermuamalah atau ibadah *mahdhah* segala sesuatunya telah diatur oleh hukum *syara'* dan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum *syara'*, dan jika menjalankan ibadah *mahdhah* bertentangan dengan hukum *syara'*, maka hukumnya ialah haram atau batal. Ketentuan tersebut berlandaskan kaidah fiqh yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَثْبُوهَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ<sup>61</sup>

Artinya: Hukum asal dalam ibadah *mahdhah* adalah batal sampai adanya dalil yang memerintahkannya.

Hukum *syara'* bukan hanya mengatur tentang ibadah *mahdhah*, juga mengatur tentang kegiatan muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lainnya baik itu interaksi sosial, perniagaan, jasa, dan bagi hasil. Dan Allah SWT mengizinkan segala bentuk kegiatan muamalah boleh dilakukan, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'*. Aktivitas muamalah ini berlandaskan pada ketentuan kaidah fiqh yakni:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>62</sup>

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Perkembangan aktivitas muamalah dikalangan manusia terus berkembang dengan munculnya berbagai bentuk aktivitas muamalah di era kontemporer seperti saat ini, sehingga para ulama dan lembaga keuangan di Indonesia saling bersinergi untuk melakukan pembaruan ekonomi syariah

---

<sup>61</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)* (Jakarta : Kencana, 2017), h. 115.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 130.

agar relevan dengan perkembangan jaman, sehingga para muslim tidak khawatir dalam berkegiatan di Lembaga keuangan yang berasaskan syariah. Oleh karena itu, pembaruan hukum ekonomi syariah terus dilakukan oleh para ulama, yang berpedoman pada ketentuan hukum syara, baik itu nash, hadis, dan fiqhiyah, berikut hukum syara yang mengatur mengenai aktivitas muamalah dalam kehidupan muslim:

### **1. Kaidah *Fiqh* Mengenai Halal dan Haram**

Kitab *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* dalam karangan Yusuf al-Qaradhwai, menerangkan kaidah *fiqh* mengenai halal-haram yaitu:

- a. “Mengharamkan hal yang halal dan menghalalkan hal yang haram termasuk syirik.”<sup>63</sup>

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan dosa besar yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah. Karena pada dasarnya hanya Allah yang memiliki hak untuk menentukan halal dan haram, dengan ajaran Islam suatu agama yang mengajarkan sesuatu hal yang halal dan haram melalui peran ulama dalam berijtihad untuk memecahkan persoalan yang ada dalam umat, sehingga jika ulama dalam menetapkan fatwa mengenai halal dan haram yakni mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram maka sama dengan menyekutukan Allah (*syirik*). Dengan demikian, ulama dalam menentukan ijtihad dan fatwa harus menghindari ketetapan yaitu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

---

<sup>63</sup>Ma'ruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah* (Banten : STIF Syentra), h. 76.

- b. “Suatu hal yang diharamkan terkandung unsur jijik dan madharat”<sup>64</sup>

Allah dan Rasul melarang menghalalkan yang haram, karena suatu hal yang haram mengandung unsur menjijikan dan dharar yang menyebabkan ketidakmaslahatan bagi ummat-Nya, sehingga Allah mengumpamakan seseorang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dengan melakukan perbuatan syirik. Jadi, Allah SWT menghalalkan dan mengharamkan sesuatu karena memiliki *'illat* yaitu untuk kemaslahatan diri manusia itu sendiri.<sup>65</sup>

- c. “Hal-hal yang dihalalkan terkandung hal yang menyebabkan sesuatu yang diharamkan tidak diperlukan lagi”<sup>66</sup>

Sesuatu yang mengandung unsur halal membawa kebaikan bagi kemaslahatan manusia, sehingga hal-hal yang diharamkan dapat diganti dengan kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi kebutuhan manusia. Misalnya, Allah mengharamkan riba tetapi diganti dengan cara yang halal yaitu mendapatkan keuntungan dari kegiatan muamalah, Allah mengharamkan perbuatan zina tetapi diganti dengan cara yang halal yaitu suatu pernikahan, Allah mengharamkan perbuatan judi tetapi Allah ganti dengan harta yang didapat dari perlombaan memanah, kuda, dan unta, Allah mengharamkan makanan *khaibaits* tetapi Allah ganti dengan makanan halal yang *thayyibat*, Allah mengharamkan minuman keras tetapi Allah ganti dengan minuman halal lain yang lezat, Allah

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h.78

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 78.

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 79

mengharamkan perbuatan mengundi dan mengetahui nasib dengan peramal tetapi Allah ganti dengan shalat istikharah untuk menentukan pilihan terbaik dari-Nya.

Allah SWT menetapkan hukum halal dan haram bagi manusia hanya untuk memberikan kemudahan dan kebaikan bagi umat-Nya dalam menjalankan kehidupan yang mendatangkan kemaslahatan dalam hidup.

- d. “Sesuatu yang menjadi perantara kepada yang haram, maka haram pula hukumnya sesuatu itu.”<sup>67</sup>

Kaidah ini menerangkan bahwasanya sarana yang menjadi perantara sesuatu hal yang haram maka terlibat dalam keharaman juga. Misalnya, perbuatan riba, sarana untuk terciptanya riba yaitu penerima, pemberi, penulis dan saksi-saksinya, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan terwujudnya riba yang diharamkan oleh Allah swt. Jadi, pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan praktik riba maka akan menanggung dosa secara bersama-sama.<sup>68</sup>

- e. “Hilah atas yang haram adalah haram.”<sup>69</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya siasat sesuatu hal yang haram dengan perubahan nama atau bentuk dengan substansi yang (Hilah) adalah haram, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwasanya

---

<sup>67</sup>Enang Hidayat, *Kaidah-kaidah Fikih Muamalah* (Bandung : Rosdakarya, 2019), h. 29.

<sup>68</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya : Bina Ilmu, 2003), h.35.

<sup>69</sup>Ma'ruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah*....,h. 82.



perubahan nama tidak berlaku secara hukum karena memiliki substansi yang sama, dan perubahan bentuk juga tidak berlaku secara hukum karena memiliki hakikat yang sama. Misalnya, riba yang diganti dengan bunga bank.<sup>70</sup>

- f. “Niat baik tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan yang haram.”<sup>71</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya, perbuatan halal dan haram dilihat dari segi niat dalam diri seseorang, cara mendapatkan atau memperoleh, dan substansi.

Benda yang dikategorikan benda halal yaitu benda yang diperoleh dengan cara yang halal, dan benda yang halal namun dikategorikan haram yaitu benda yang halal yang didapat dengan cara yang haram, serta benda haram tidak dapat dikategorikan benda halal meskipun didapat dengan cara yang halal.

Hakikat haram tetap haram tidak dapat berubah menjadi halal dengan ditutupi oleh niat baik, pada dasarnya segala sesuatu harus seiring dengan niat baik untuk mewujudkan hal yang halal tanpa unsur haram.

- g. “Harus menghindari hal-hal yang syubhat karena khawatir akan terjerumus kedalam hal-hal yang haram.”<sup>72</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya, antara yang halal dan yang haram sudah jelas, dan diantara keduanya ada hal

---

<sup>70</sup>Ma'ruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah*.... h. 84.

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 86.

*mutasyabihat*, seorang muslim yang meninggalkan hal yang mengandung syubhat, maka tidak akan terlibat dalam perbuatan yang haram. Namun, jika seorang muslim melakukan sekali perbuatan syubhat maka dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang mengandung unsur haram. Yusuf al-Qaradhawi menerangkan persoalan halal sudah jelas, dan persoalan yang haram juga sudah jelas sehingga tidak ada *rukhsah* untuk mengerjakannya secara leluasa. Umat muslim hendaknya menjauhi hal yang mengandung syubhat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

- h. “Sesuatu yang diharamkan adalah haram untuk semua orang.”<sup>73</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya, sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang dan syariat Islam menetapkan unsur haram berlaku secara menyeluruh sehingga tidak ada yang dibedakan, Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa ajaran Islam tidak membedakan dari segi haram bagi orang selain Arab dan kehalalan hanya untuk orang Arab, sesuatu hal yang haram bagi orang berkulit hitam dan halal untuk orang berkulit putih, dan tidak dibedakan atas kelompok atau suku untuk menentukan halal dan haram. Tidak diberlakukan *rukhsah* untuk suatu tingkatan atau golongan karena

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 87.

akan berdampak perbuatan jahat yang dapat dikendalikan oleh hawa nafsunya.<sup>74</sup>

- i. “Dalam keadaan terpaksa, seseorang boleh melakukan hal yang dilarang.”<sup>75</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya, dalam Islam tidak melupakan terhadap kepentingan dan kelemahan manusia, oleh sebab itu, dalam ajaran Islam memperbolehkan sesuatu yang dilarang atau haram dilakukan dalam keadaan terpaksa, seperti yang ada pada nash yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: Lalu siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tiada berdosa atasnya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha belas kasih.  
(Q. S. Al-Baqarah 2:173)

Setiap manusia boleh melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat, dan tidak diperbolehkan dalam keadaan darurat mengendalikan diri dengan hawa nafsunya.

### c. Dasar Ajaran Islam Mengenai Pencampuran antara yang Halal dan Haram

#### 1. Ketentuan *Syara'* Mengenai Pencampuran Dana antara yang Halal dan Haram

Lembaga keuangan konvensional yang merajai perekonomian dunia tidak menutupi kemungkinan bahwasanya keterlibatannya dalam

<sup>74</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*..... h. 42.

<sup>75</sup>Ma'ruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah*....,h. 88.

perekonomian syariah terutama dalam hal pendanaan maupun pembiayaan, yang menimbulkan adanya pencampuran antara dana halal dan haram, sehingga perlu untuk mengkaji mengenai pencampuran dana antara halal dan haram, pendapat pertama mengenai dalil yang digunakan dalam persoalan tersebut adalah haram yaitu :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ<sup>76</sup>

Artinya: Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.

Periwayatan hadis ini, menurut Imam al-Subki yaitu hadis ini diriwayatkan dari jalur Abd al-Razzaq di kitab *mushnaf*-nya, hadis ini termasuk *mauquf* sampai ke Ibn Mas'ud (tidak *marfu'*). Namun demikian, al-Subki mengatakan bahwa kaidah tersebut termasuk shahih secara substantif.<sup>77</sup>

Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagai Lembaga Fikih Islam dalam keputusannya no. 7/1/65, pada pertemuan ke-7 yaitu :

أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ غَرَضُهَا الْأَسَاسِيُّ  
مُحَرَّمٌ كَالْتِّعَامِلِ بِالرِّبَا أَوْ إِنْتَاجِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ أَلْمَتَا جَرَّةَ بِهَا وَالْأَصْلُ  
حُرْمَةُ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ تَتَعَامَلُ أَحْيَانًا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنْشِطَتِهَا  
الْأَسَاسِيَّةِ مَشْرُوعَةً<sup>78</sup>

Artinya : Bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya,

<sup>76</sup>Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2019), h. 32.

<sup>77</sup>Ma'ruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah* (Banten : STIF SYENTRA, 2018), h. 92.

<sup>78</sup>Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), h. 217.

haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram seperti transaksi ribawi dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu adalah usaha yang halal.

Berdasarkan kaidah fikih tersebut, bahwasanya apabila ada pencampuran dana halal dengan dana yang haram, maka dana haram dimenangkan, dan dari dana haram tersebut menjadi hukum keseluruhan.

Kedua, pendapat yang menjelaskan bahwasanya jika dana halal lebih dominan dengan dana non halal, maka hukum keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Dengan berlandaskan kaidah-kaidah yaitu :

لَا أَكْثَرُ حُكْمِ الْكُلِّ<sup>79</sup>

Artinya: Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan.

Berdasarkan kaidah fikih tersebut, jika dana halal lebih dominan dibandingkan dana non halal, maka hukum keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Namun, jika lebih dominan dana non halal, maka hukum keseluruhan dana tersebut menjadi haram.

Perkembangan perekonomian dunia yang didominasi keuangan konvensional, tidak dapat dihindari dalam pembangunan Lembaga keuangan syariah karena melibatkan praktik pendanaan yang masih menggunakan dana non halal dari keuangan konvensional. Sehingga para ulama berpendapat untuk persoalan ini, sebagai berikut:

Ibnu Nujaim menyatakan:

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 218

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ الْحَنْفِيُّ أَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ<sup>80</sup>

Artinya : “Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.”

An-Nawawi menyatakan sebagai berikut:

قَالَ النَّسَوِيُّ: الْخُلْطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ بِحَالٍ يَنْحَصِرُ لَمْ يَحْرُمِ الشِّرَاءُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عِلْمٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ تَرْكُهُ وَرَعٌ مُحْبُوبٌ وَكُلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ تَأَكَّدَ الْوَرَعُ<sup>81</sup>

Artinya : An-Nawawi berkata, “Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah SWT, setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan *wara*.”

Ibnu Taimiyah menyatakan sebagai berikut:

فَأَمَّا الْمُتَعَامِلُ بِالرِّبَا فَالْعَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَلَالِ ، إِلَّا أَنْ يُعْرِفَ الْكُفْرَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ ، فَالزِّيَادَةُ هِيَ الْمُحَرَّمَةُ فَقَطْ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَاخْتَلَطَ لَمْ يَحْرُمِ الْحَلَالُ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْراً لِلْحَلَالِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ لِشَرِيكَيْنِ ، فَاخْتَلَطَ مَالُ أَحَدٍ هُمَا بِمَالٍ

<sup>80</sup>Ibid.

<sup>81</sup>Ibid., h. 219

الْأَخْرَفَانَهُ يُقَسِّمُ بَيْنَ الشَّرِيكََيْنِ]. . وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ  
وَالْحَرَامُ أُخْرِجَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَالٌّ لَهُ<sup>82</sup>

Artinya : "Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika seseorang menjual 1.000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja. Jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur, maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. Ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut. Begitu pula dana halal bercampur dengan dana haram, maka persentase dana haram dikeluarkan, maka sisanya adalah dana halal."

Berdasarkan pendapat para ulama mengenai dana halal dan dana non halal, diantara pendapat yang kuat (rajih) ialah:

- a. Dana halal lebih mendominasi dibandingkan dana non halal, maka hukum keseluruhan dana tersebut ialah halal.
- b. Adanya jumlah dana halal sama atau sedikit dibandingkan dana haram, maka jumlah persentase dana haram harus dikeluarkan. Dan dana yang tersisa maka hukumnya halal.<sup>83</sup>

Sebab alasan pendapat yang kuat dari ulama diatas yaitu:

- a. *Umum al-balwa*, adanya dana non halal yang terlibat sukar untuk dihindarkan dalam kegiatan bisnis atau kegiatan lain.
- b. *Raf'ul haraj wal hajah al-ammah*, adanya keterlibatan keuangan konvensional yang tidak bisa dihindarkan sehingga mengurangi kesulitan untuk kemaslahatan umum.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*, 220.

c. *Muro'at qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah*, yang memiliki arti bahwa standarisasi hukum ialah sesuatu yang lebih dominan.<sup>84</sup>

## 2. Ketentuan Syara Mengenai Pencampuran Zat (Benda) antara yang Halal dan Haram

Pencampuran antara yang halal dan haram juga terdapat dalam zat atau benda yang halal maupun yang haram, setiap manusia memiliki kebutuhan pangan yang penting dalam kehidupan, tentunya sebagai konsumen muslim menginginkan pangan yang terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Seperti perintah Allah SWT yang mewajibkan setiap muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang tertuang dalam nash :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Allah berfirman, “Wahai para Rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
(Q.S. Al-Mu'minun 23 : 51)

Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan para Rasul dan hambanya untuk memakan sesuatu hal yang telah dihalalkannya, dan menjauhi sesuatu yang telah diharamkannya, seperti dalam firmannya dalam nash :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa

---

<sup>84</sup>*Ibid.*



terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 173)

Berdasarkan ayat tersebut, bahwasanya Allah SWT mengharamkan sesuatu yang mengandung bangkai, darah, daging babi, dan menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah SWT. Diantara kedua ayat tersebut sudah jelas antaran yang halal dan yang haram.

Adanya hadis yang memerintahkan mengikuti peraturan halal dan haram, untuk konsumen muslim yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ  
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ  
الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَمَنْ وَقَعَ فِي  
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْنَعَ فِيهِ  
أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً  
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَفَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: Dari Muhammad bin Abdilllah ibn Numair al-Hamdani, dari ayahku dari Zakariyya dari Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir telah berkata saya telah men dengar Rasulullah Saw. dan dia bahwa dengan telunjuk nya ke arah telinganya, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya ada masalah syubhat, kebanyakan manusia atau orang tidak mengetahuinya. Karena itu maka barang siapa menjaganya/bertakwa terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus pada sesuatu di dalam syubhat, berarti hampir terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana jika seseorang menggembala ternaknya di sekitar Hima (tempat/area milik raja yang dijaga atau dilindungi dan terlarang dimasuki orang

lain dan siapa yang memasukinya maka akan dijatuhi saksi hukuman). Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki hima, ketahuilah bahwa hima Allah adalah larangan-larangan-Nya”. (H.R. Muslim).

### 3. Penyaluran dan Pengelolaan Substansi Non Halal

Ulama menetapkan tiga hal penting dalam pencampuran antara sesuatu yang halal dengan yang haram yaitu, jika pendapatan non halal lebih dominan dibandingkan pendapatan halal maka keseluruhan hukumnya menjadi haram, halalnya modal usaha yang berasal dari usaha yang halal, hasil dari pendapatan non halal harus dikelola untuk diberikan kepada orang lain sebagai sedekah.<sup>85</sup>

Para ulama berpendapat memperbolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk *mashalih ammah* , yaitu pendapatan dana non halal tidak boleh digunakan untuk kebutuhan bagi pemilik dana tersebut karena dana non halal hukumnya haram bagi pemiliknya dan halal bagi penerimanya, dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum atau disalurkan untuk kebutuhan sosial.

Adapun Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan:

وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْمَالَ خَبِيثٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ اِكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَلَكِنَّهُ طَيِّبٌ  
بِالنِّسْبَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَجِهَاتِ الْخَيْرِ. هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، حَلَالٌ لِتِلْكَ الْجِهَاتِ. فَالْمَالُ  
لَا يَحْبُثُ فِي ذَاتِهِ، إِنَّمَا يَحْبُثُ بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ<sup>86</sup>

Artinya: “Menurut saya dana non halal itu kotor (*khabits*) bagi pihak yang mengusahakannya, tetapi dana tersebut halal bagi (penerimanya, seperti) orang-orang kafir dan kebutuhan sosial.

<sup>85</sup>Adiwarman Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 222.

<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 225.

Karena dana tersebut bukan haram karena fisiknya, tetapi karena pihak dan sebab tertentu.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, bahwasanya dana non halal itu harus dikeluarkan (*takhallus*) oleh pemiliknya, kepemilikan dana non halal tersebut bukan hanya milik pihak tertentu melainkan milik pihak umum, menggunakan dana non halal bagi pemiliknya ialah hukumnya haram. Namun, hukumnya halal bagi penerimanya, misalnya fakir miskin, yayasan sosial, pendidikan, dan fasilitas umum maupun kebutuhan sosial.

Menurut standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) menjelaskan bahwa pendapatan non halal hukumnya haram. Dengan demikian tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku usahanya baik dimanfaatkan untuk hajat atau dimanfaatkan sebagai *hilah*, misalnya, menggunakan pendapatan non halal untuk membayar pajak. Namun, pendapatan non halal hanya dapat disalurkan sebagai sedekah untuk kemaslahatan umum. Tertuang dalam standar AAOIFI Bahrain yaitu:

لَا يَجُوزُ إِلَّا نِفَاعٌ بِالْعَنْصَرِ الْمُحَرَّمِ الْوَاجِبِ التَّخْلُصِ مِنْهُ - بِأَيِّ وَجْهِ مِنْ  
وُجُوهِ الْإِنْتِفَاعِ وَلَا التَّحَايِلُ عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ وَلَوْ بَدَعَ  
الضَّرَائِبِ<sup>87</sup>

Artinya: Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.

---

<sup>87</sup>Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah (kaidah-kaidah ijtihad dan fatwa dalam ekonomi Islam)* (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 97.

Menurut Ibn Taimiah menerangkan bahwa, “jika harta pengusaha bercampur antara yang halal dan yang haram dan sektor usaha tergolong usaha yang syubhat, maka jangan langsung dihukumi haram. Namun, kecuali sudah diketahui secara pasti mengenai keharamannya, serta tidak bisa langsung dihukumi halal kecuali sudah mengetahui kehalalannya secara pasti. Kemudian, jika mayoritas hartanya halal, jadi hukum keseluruhannya menjadi halal, sehingga tidak dapat dihukumi haram. Dan jika mayoritas hartanya haram, maka hukum keseluruhan hartanya menjadi haram. Untuk pengelolaan dana non halal dapat dipilah atau disaring antara harta yang halal dan harta yang non halal dengan acara analisis faktual yaitu mengeluarkan kadar harta yang tergolong haram, dan harta sisa yang telah dipilah ialah harta yang halal baginya.”<sup>88</sup>

Persoalan terhadap zat atau benda yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain menggunakan kaidah yaitu:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ<sup>89</sup>

Artinya: Apabila harta halal dan haram berkumpul, maka yang menang adalah harta haram.

Berdasarkan kedua kaidah tersebut, bahwasanya pengelolaan atas pencampuran antara yang halal dengan yang haram terdapat dua solusi yaitu apabila yang bercampur dana halal dengan dana non halal, maka dapat dilakukan dengan mengeluarkan kadar haram baik untuk *mashalih ‘ammah* atau kebutuhan sosial, sehingga yang tersisa

---

<sup>88</sup> Ma’ruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah*..., h. 99.

<sup>89</sup> *Ibid.*

merupakan dana yang halal bagi pemiliknya, dan jika yang bercampur sesuatu zat atau benda yang suci dan yang najis sehingga tidak dapat dibedakan atau dipisahkan antara yang satu dengan yang lain maka hukum keseluruhan menjadi haram.

Ibnu Qayyim mengatakan, “Sesungguhnya syariat Islam berikut prinsip dan dasar hukumnya adalah kemaslahatan untuk manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat ini merupakan keadilan, kasih sayang, maslahat, dan mengandung hikmah. Setiap masalah yang telah keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih sayang menuju kebalikannya, dari kebaikan menuju kerusakan, bukanlah syariat”<sup>90</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Adanya penelitian terdahulu mengenai *screening* Saham Syariah dan keterlibatan dana non halal dalam kriteria Saham Syariah, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Noor Mifrahi dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis Syariah Stock Screening Yang Berlaku Di Indonesia, Malaysia Dan Gabungan Keduanya”.<sup>91</sup> Berdasarkan penelitiannya, DES Indonesia dan DES yang disaring dengan syariah stock screening Malaysia keduanya tidak terdapat perbedaan market performance. Namun, jika DES yang

---

<sup>90</sup>Muhammad As-Sayyid Yusuf, Ahmad Durrah, Muhammad Abdul Qadir Hatim, *Ensiklopedi Metodologi Al-quran Jilid 2 Hukum* (Jakarta : Kalam Publika, 2010), h. 79.

<sup>91</sup>Mustika Noor Mifrahi, “Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis Syariah Stock Screening Yang Berlaku Di Indonesia, Malaysia, Dan Gabungan Keduanya”, *Ekbisi*, Vol. VII No. 2 (Juni 2017), h. 214-232.

disaring dengan menggunakan syariah stock screening gabungan dapat menghasilkan return tertinggi. Syariah stock screening Malaysia merupakan kelompok Saham yang menghasilkan tingkat M2 yang paling baik, dan di Indonesia belum mampu meningkatkan kinerja DES, disebabkan kondisi ekonomi dan fundamental Pasar modal syariah sangat memengaruhi perbedaan kinerja Saham-saham Syariah di Indonesia dan Malaysia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Refky Fielnanda dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Berdasarkan penelitiannya, memperkuat pemikiran Gholamreza zandi, Seif el-din I taj, Zamir Iqbal, dan Sami al-suwailem, pendapat mereka bahwasanya setiap negara pasar modal begitu penting sebagai penggerak perekonomian suatu negara. Dengan demikian, sistem pasar ekuitas harus diawasi dengan baik, dengan cara melakukan *screening* terhadap emiten yang dapat melanggar suatu aturan hukum Islam, baik penyaringan secara aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Islam mengajarkan bahwasanya Saham Syariah merupakan bagian dari investasi. Oleh sebab itu, untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, maka dilakukan *screening* terhadap Saham Syariah.<sup>92</sup>

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai adanya proses *screening* terhadap kriteria Saham Syariah untuk dikategorikan

---

<sup>92</sup>Refky Fielnanda, “Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia”, *Al-Falah*, Vol. 2 No. 2 (2017), h. 104-122.

sebagai Saham Syariah dan proses screeningnya sangat penting untuk menjadi wawasan dan pendukung dalam skripsi ini. Adanya perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah rumusan masalah dan titik fokus sesuatu yang diteliti. Penelitian sebelumnya hanya meneliti terkait proses *screening* untuk dikategorikan sebagai Saham Syariah. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini meneliti terkait kriteria Saham Syariah yang melibatkan dana non halal dan tinjauan hukum Islamnya, serta pengaplikasian pengelolaan emiten yang menggunakan dana non halal untuk dikategorikan sebagai Saham Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Karim, A. (2013). *Bank Islam (Analisis Fqih dan Keuangan)* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.Karim, A. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Abdalloh, I. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Adam, P. (2018). *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Amin, M. (2018). *Makharij Fiqhiyyah Penopang Arus Baru Ekonomi Indonesia*. Banten: STIF Syentra.
- Amin, M. (2018). *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah (Pengembangan produk keuangan kontemporer)*. Banten: STIF Syentra.
- Ana Rokhmatussadyah, S. (2011). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Cholid Narbuko, A.A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djazuli. (2017). *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)* . Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, E. (2019). *Kaidah-kaidah Fikih Muamalah* . Bandung: Rosdakarya.
- Hidayat, T. (2010). *Buku Pintar Investasi (Reksa Dana, Saham, Opsi Saham, Valas, & Emas)*. Jakarta : Trans Media.
- Indonesia, M. U. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta : Kencana



- Muhammad As-Sayyid Yusuf, A. D. (2010). *Ensiklopedi Metodologi Al-quran Jilid 2 Hukum*. Jakarta: Kalam Publika.
- Mudjib, A. (2001). *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta : Kalam Mulia.
- Nurul Huda, M. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)* . Jakarta: Prenadamedia.
- POJK.NO.35/POJK.04/2017. (n.d.).
- Qardhawi, S. M. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sahroni, O. (2017). *Ushul Fikih Muamalah (kaidah-kaidah ijtihad dan fatwa dalam ekonomi Islam)* . Depok: Rajawali Pers.
- Shiddiq, S. (2016). *Fikih Kontemporer* . Jakarta: Kencana.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah* . Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soemitra, A. (2014). *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian gabungan)*. Jakarta: Kencana.

## JURNAL

- Adlan, M. (2018, Juni-Desember). Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non halal terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 No. 2, 104.
- Ahmad. (2018, Juni). Desain Penelitian Analisis Isi (content analysis). *Jurnal Ahmad*, 1 No. 1, 1.
- Fielnanda, R. (2017). Konsep screening saham syariah di Indonesia. *Al-Falah*, 2 No. 2, 105.
- Fielnanda, R. (2017). Konsep screening saham syariah di Indonesia. *Al-Falah*, 2 No. 2, 109.

- Firmansyah, E. E. (2017). Seleksi Saham Syariah (Perbandingan antara BEI dan Malaysia). *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 1 No. 1, 6.
- Hasan, H. (2012, Oktober). Efektivitas pengawasan Otoritas jasa keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 No. 3, 380.
- Indaryanto, W. (2012, Oktober). Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 No. 3, 333-334.
- Miftahi, M. N. (2013). Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis Syariah Stock Screening yang Berlaku di Indonesia, Malaysia dan Gabungan Keduanya. *Ekbisi*, VII No. 2, 220.
- Nur, E. R. (2015, Juni). Riba dan Gharar suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. *Al-'Adalah*, XII No. 3, 647-648.
- Nurlita, A. (2014). Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam. *Kutub Khanah*, 17 No. 1, 8.
- Prasetyo, Y. (2017, Februari). Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah. *Ekuibis*, 1 No. 2, 70.
- Rahyani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 No. 3, 368-369.
- Sitompul, Z. (2012, Oktober). Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 No. 3, 345.
- Sitompul, Z. (2012). Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 No. 3, 354.
- Triyanta, A. (2010, Oktober). Gharar Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Hukum*, 17 No. 4, 626.
- Yafiz, M. (2008, Juli-Desember). Saham dan Pasar Modal Syariah (Konsep, sejarah, dan perkembangannya). *Miqot*, xxx No. 2, 239.

#### **SUMBER ON-LINE**

- Indonesia, I. Z. (n.d.). Retrieved Mei 4, 2019, from <https://izi.or.id/peruntukan-dana-non-halal/>
- keuangan, O. j. (n.d.). Retrieved April 13, 2019, from <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>